

**PERAN MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN *MANDATORY DISCLOSURE* KONVERGENSI
IFRS DAN DAMPAKNYA TERHADAP *RETURN SAHAM*
(Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2014 – 2017)**

***THE ROLE OF CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM ON THE
LEVEL OF COMPLIANCE WITH MANDATORY DISCLOSURE IFRS
CONVERGENCE AND THE IMPACT ON STOCK RETURN
(Empirical Studies on State-Owned Enterprises listed on the Indonesia Stock
Exchange in 2014-2017)***



Oleh :

DIANING WIDYA KUSUMASTUTI

20150420265

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Naskah publikasi dengan judul:

**PERAN MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN *MANDATORY DISCLOSURE* KONVERGENSI
IFRS DAN DAMPAKNYA TERHADAP *RETURN SAHAM*
(Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2014 – 2017)**



Evi Rahmawati, S.E., M.Acc., Ph.D., Ak., CA

Dosen Pembimbing

**PERAN MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN *MANDATORY DISCLOSURE* KONVERGENSI IFRS DAN
DAMPAKNYA TERHADAP *RETURN SAHAM*
(Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2014 – 2017)**

DIANING WIDYA KUSUMASTUTI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of mechanism corporate governance on the level of compliance with mandatory disclosure IFRS convergence and its impact on stock return in State-Owned Enterprises listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2017. In this study, there are 80 samples were selected by purposive sampling method. Analysis of data using IBM SPSS program version 21.0.

This result is indicate that foreign ownership, the number of members of the board of commissioners, the number of board of commissioner meetings and the number of audit committee members has significant effect on the level of compliance with mandatory disclosure IFRS convergence. For managerial ownership, institutional ownership and the proportion of independent commissioners hasn't significant effect on the level of compliance with mandatory disclosure IFRS convergence. While, the level of compliance with mandatory disclosure IFRS convergence hasn't significant effect on stock return.

Keywords : stock return, the level of compliance with mandatory disclosure IFRS convergence, foreign ownership, the number of members of the board of commissioners, the number of board of commissioner meetings, the number of audit committee members, managerial ownership, institutional ownership and the proportion of independent commissioners.

I. PENDAHULUAN

Pelaporan keuangan suatu perusahaan diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Laporan keuangan memuat informasi yang dijadikan sebagai bahan

pertimbangan bagi *stakeholders* untuk membuat keputusan yang tepat. Misalnya, keputusan investasi oleh investor dan calon investor.

Semakin bertambahnya kebutuhan informasi bagi investor dan *stakeholders* lainnya, membuat perusahaan perlu untuk mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan keuangan. Investor menginginkan informasi yang luas dan relevan untuk mengambil keputusan dengan tepat yang berkaitan dengan investasi modalnya pada suatu perusahaan.

Terdapat dua jenis pengungkapan, yaitu *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure*. *Mandatory disclosure* lebih kepada pengungkapan informasi yang harus dilakukan perusahaan karena dianggap perlu/penting bagi pemakainya (Suhardjanto dan Miranti, 2009). *Mandatory disclosure* sangat penting untuk dilakukan, karena semakin luas pengungkapan informasi yang disajikan dalam *annual report* maka kualitas perusahaan akan semakin baik. *Mandatory disclosure* juga menjadi sarana bagi perusahaan untuk memberikan jaminan bahwa modal yang ditanamkan investor pada perusahaan telah dikelola dengan efektif (Istiningrum, 2016).

Indonesia telah melakukan konvergensi standar akuntansi internasional, yaitu IFRS pada 1 Januari 2012. IFRS juga telah diadopsi oleh negara-negara lain, sehingga hal ini memudahkan penggunaan informasi laporan keuangan bagi investor asing yang ingin menanamkan modalnya pada perusahaan di Indonesia. IFRS juga menekankan kaitannya kepatuhan wajib yang harus dilakukan secara penuh oleh perusahaan.

Pada kenyataannya, pasca pengadopsian IFRS di Indonesia, tingkat kepatuhan dalam pengungkapan wajib belum mencapai 100%. Oleh karena

itu diperlukan CG (*corporate governance*) yang berperan untuk mengawasi manajemen dalam pengelolaan perusahaan serta memastikan bahwa perusahaan telah melakukan pengungkapan informasi yang dibutuhkan pengguna informasi.

Dengan adanya struktur dalam CG diharapkan dapat meminimalisir asimetri informasi. Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam CG. Transparansi dapat diwujudkan dalam pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan. Artinya, perusahaan tidak hanya mengungkapkan informasi yang baik-baik saja, namun perusahaan juga harus menyampaikan informasi sesuai apa yang terjadi tanpa ada yang dimanipulasi atau disembunyikan.

Struktur kepemilikan juga merupakan bagian dari mekanisme CG. Penelitian Fauziah (2015) mengidentifikasi bahwa mekanisme CG yang diproksikan dalam kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat keputahan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Kepemilikan institusional dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam melakukan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fauziah (2015). Dengan adanya keterbatasan geografis dan bahasa, perusahaan yang memiliki kepemilikan asing akan melakukan pengungkapan informasi yang luas, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alvionita dan Taqwa (2015).

Selain itu, mekanisme GC juga diproksikan dalam jumlah anggota dewan komisaris. Berdasarkan penelitian Gunawan dan Hendrawati (2016) menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif

terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Keberadaan komisaris independen dianggap mampu mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam melakukan pengungkapan wajib, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fauziah (2015).

Selaku pihak yang mengawasi manajemen perusahaan, kualitas kinerja dari dewan komisaris dapat dilihat dari frekuensi rapat yang mereka lakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sutiyok dan Rahmawati (2014) menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Komite audit memiliki peran untuk membantu tugas dewan komisaris. Keberadaan komite audit dianggap dapat meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib perusahaan, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Gunawan dan Hendrawati (2016).

Menurut Ahmad, dkk. (2017) menyebutkan bahwa pengungkapan informasi akan mempengaruhi tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan. Investor memerlukan informasi yang relevan dan akurat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Apabila keputusan yang diambil investor tepat, maka akan mempengaruhi tingkat pengembalian (*return* saham) yang investor terima.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini berjudul : **PERAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN MANDATORY DISCLOSURE KONVERGENSI IFRS DAN DAMPAKNYA TERHADAP RETURN SAHAM.**

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan antara pihak pemilik dan manajemen. Teori keagenan sebagai hubungan kerjasama antara pemilik dan manajemen. Dalam hubungan antara pemilik dan manajemen terdapat asimetri informasi, yang mana pihak manajemen lebih mengetahui informasi tentang internal perusahaan dan bagaimana prospek perusahaan di masa depan. Sehingga diperlukan CG untuk meminimalisir asimetri informasi tersebut.

2. Teori *Stakeholders*

Menurut Gunawan dan Hendrawati (2015), teori *stakeholders* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus mampu memberikan manfaat bagi *stakeholders*-nya. Salah satu manfaat yang dapat diberikan kepada *stakeholders* yaitu dengan melakukan pengungkapan informasi secara luas.

3. Teori Persinyalan

Teori persinyalan dapat menjelaskan bahwa asimetri informasi dapat dikurangi dengan memberikan sinyal kepada pihak terkait. Teori ini menggambarkan bagaimana perusahaan dapat memberikan sinyal kepada penerima sinyal (*signaler*). Sinyal dapat berupa pengungkapan informasi perusahaan. Dengan pengungkapan

informasi, pengguna informasi nantinya akan menunjukkan reaksi berupa pengambilan keputusan.

B. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Kepemilikan manajerial adalah proporsi kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen (dewan direksi dan dewan komisaris).

Fauziah (2015) meneliti tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pasca konvergensi IFRS dengan hasil berpengaruh signifikan positif. Manajemen memiliki sedikit motivasi untuk bertindak sesuai keinginan pemegang saham, sehingga diperlukan kepemilikan manajerial untuk memotivasi manajemen agar meningkatkan kinerjanya. Kepemilikan manajerial artinya pihak manajemen tidak hanya berperan sebagai pengelola perusahaan, namun mereka dapat andil dalam pengambilan keputusan. Dengan kepemilikan saham yang besar dalam perusahaan, maka manajemen akan memiliki motivasi yang tinggi dalam mematuhi peraturan yang ada, termasuk ketaatan dalam melakukan pengungkapan wajib. Dari uraian tersebut, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusi terhadap Tingkat *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS.

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham suatu perusahaan oleh lembaga non-bank seperti yayasan, reksadana, asuransi, dana pensiun dan institusi lainnya.

Dari penelitian Widjayanti dan Wahidawati (2015) didapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka usaha pengawasan akan dilakukan dengan ketat terhadap manajemen sehingga akan menghalangi sifat opportunistik para manajer. Tingginya kepemilikan institusional akan menekan manajemen agar mengungkapkan informasi yang investor inginkan. Dari uraian tersebut, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

3. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Tingkat *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS.

Kepemilikan asing adalah proporsi kepemilikan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh individu maupun institusi yang berada di luar negeri. Penelitian Rustiarini (2011) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Dengan semakin tingginya kepemilikan asing akan menjadikan proses *monitoring* perusahaan dapat dilakukan dengan baik, sehingga manajemen akan

memberikan informasi menyeluruh bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dari uraian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

4. Jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Anggota dewan komisaris memiliki peran melakukan pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah mengimplementasikan *corporate governance* dengan baik (Hikmah dkk., 2011). Dari penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan Hendrawati (2016), terdapat pengaruh signifikan positif jumlah anggota dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Semakin besar dewan komisaris disuatu perusahaan akan meningkatkan pengawasan, pengevaluasian, dan pelaksanaan kebijakan direksi yang semakin berkualitas sesuai dengan tujuan perusahaan, serta semakin berfungsinya *corporate governance* dalam meningkatkan kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Dari uraian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

5. Proporsi Komisaris Independen terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang bukan berasal dari dalam perusahaan. Komisaris independen dapat memastikan apakah ketransparanan telah tercipta, struktur organisasi sudah baik, serta keputusan yang diambil bersifat rasional (Utami dkk., 2012).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Widjayanti dan Wahidawati (2015), terdapat pengaruh signifikan positif antara proporsi komisaris independen berpengaruh pada tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Menurut Widjayanti dan Wahidawati (2015) menyebutkan bahwa semakin besar komposisi komisaris independen maka kualitas pengawasan yang dilakukan dewan komisaris akan semakin bagus karena semakin banyak pihak yang independen maka transparansi dalam melakukan pelaporan akan semakin baik. Dari uraian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₅ : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

6. Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Kualitas kinerja dari dewan komisaris tidak hanya dilihat dari jumlah atau proporsinya saja. Namun, jumlah rapat yang dilakukan juga akan mempengaruhi kualitas kerjanya dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen.

Hasil penelitian Kharis dan Suhardjanto (2012) menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap

kepatuhan pengungkapan wajib. Semakin sering dewan komisaris melakukan rapat maka pengawasan terhadap manajemen akan lebih optimal. Dewan komisaris akan memastikan apakah tata kelola perusahaan telah dilaksanakan dengan baik, jika sudah maka tingkat kepatuhan pengungkapan wajib akan semakin tinggi. Artinya, perusahaan akan melakukan pengungkapan informasi secara lengkap. Dari uraian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₆ : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

7. Pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS

Komite audit bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris. Komite audit berperan untuk mengawasi pengendalian internal perusahaan dan pelaporan keuangannya. Selain itu, komite audit juga berperan untuk mengawasi dan menjembatani hubungan antara auditor internal dan eksternal (Rahayuni dkk., 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan Pitasari dan Septiani (2014) menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS. Pada penelitian Pitasari dan Septiani (2014), jumlah anggota komite audit pada perusahaan sampel telah memenuhi syarat minimum yaitu tiga orang, yang mana komite audit akan memberikan pendapat profesionalnya terhadap dewan komisaris dan komite audit juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah

melakukan pengungkapan informasi sesuai dengan peraturan. Dari uraian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₇ : Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

8. Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS terhadap *Return Saham*

Return saham merupakan salah satu motivasi mengapa investor melakukan penanaman modal pada suatu perusahaan. Penelitian Budi dan Djazuli (2012) menunjukkan bahwa pengungkapan informasi tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*) dapat meningkatkan return saham. Dengan diumumkannya informasi akuntansi maka akan memberikan sinyal kepada investor untuk melakukan keputusan investasi. Jika informasi yang diumumkan tersebut positif, maka investor akan tertarik untuk melakukan perdagangan saham. Semakin banyak perdagangan saham yang dilakukan investor, maka akan mendorong naiknya harga saham sehingga *return* yang didapat investor akan meningkat. Dari uraian tersebut peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₈ : Tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS berpengaruh terhadap *return* saham.

III. METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Sampel dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan dari perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017.

B. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder berupa *annual report* yang didapat dari Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia di Yogyakarta.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Untuk mendapatkan sampel yang representatif, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI secara berturut-turut pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017.
2. Mempublikasikan informasi yang dibutuhkan peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan analisis, penghitungan dan pencatatan. Peneliti menggunakan data dari *annual report* perusahaan BUMN.

E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen

a. Return Saham

Return saham merupakan tingkat pengembalian atas sejumlah modal yang ditanamkan pada suatu perusahaan (Sugiyanto, 2011).

Untuk menghitung return saham, digunakan rumus sebagai berikut :

$$R_i = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

Keterangan :

P_t = *closing price* tahun t

P_{t-1} = *closing price* tahun t-1

b. Mandatory Disclosure

Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan wajib akan informasi perusahaan yang dianggap perlu dalam memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan yang berbeda – beda kepentingannya (Suhardjanto, dkk., 2011). *Mandatory Disclosure* diidentifikasi menggunakan item pengungkapan dari *checklist* 172 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Identifikasi *checklist* pengungkapan dilakukan pada bagian laporan laba rugi komprehensif yang terdiri atas 117 item. *Mandatory disclosure* diukur menggunakan teknik *scoring*, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$MD = \frac{\text{jumlah item informasi yang diungkapkan}}{\text{jumlah item}} \times 100\%$$

2. Variabel Independen

a. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen (dewan direksi maupun komisaris) yang secara aktif ikut andil dalam pengambilan keputusan. Untuk menghitung kepemilikan manajerial, digunakan rumus sebagai berikut :

$$KPM = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

b. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga non-bank seperti reksadana, asuransi, dana pensiun, yayasan dan institusi lainnya. Untuk

menghitung kepemilikan manajerial, digunakan rumus sebagai berikut :

$$KPI = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki pihak institusi}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

c. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh individu maupun institusi yang berada di luar negeri. Semakin tinggi kepemilikan asing, maka dapat meningkatkan kepatuhan pihak manajemen dalam melakukan pengungkapan wajib. Untuk menghitung kepemilikan manajerial, digunakan rumus sebagai berikut :

$$KPA = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki investor asing}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

d. Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Anggota dewan komisaris memiliki peran untuk memberikan pengawasan, mengevaluasi, serta memberikan nasehat kepada manajemen (Muntoro, 2008). Jumlah anggota dewan komisaris diukur dengan jumlah dewan komisaris dari pihak yang terafiliasi dan tidak terafiliasi dengan perusahaan (Hafiz M dkk., 2015).

e. Proporsi Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang bukan berasal dari dalam perusahaan. Komisaris independen dapat memastikan apakah ketransparanan telah tercipta, struktur organisasi sudah baik, serta keputusan yang diambil bersifat rasional (Utami dkk., 2012). Proporsi komisaris independen diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$PKI = \frac{\text{jumlah anggota dewan komisaris independen}}{\text{jumlah anggota dewan komisaris}}$$

f. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Jumlah pertemuan yang dilakukan dewan komisaris akan menentukan seberapa efektif peran dewan komisaris dijalankan. Semakin sering mengadakan pertemuan maka proses evaluasi terhadap pihak manajemen akan semakin sering dilakukan, dengan begitu kinerja perusahaan akan meningkat. Jumlah rapat dewan komisaris dihitung berdasarkan jumlah rapat yang dewan komisaris lakukan dalam satu periode.

g. Jumlah Anggota Komite Audit

Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris salah satunya yaitu memastikan apakah laporan keuangan yang disajikan perusahaan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pada penelitian ini jumlah anggota komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit dalam perusahaan (Prawinandi dkk., 2012).

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Tabel 1
Proses Pengambilan Sampel

No	Keterangan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Total
1	Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	20	20	20	20	80
4	Jumlah sampel yang dapat diolah	20	20	20	20	80

A. Analisis Deskriptif

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KPM	80	0	.47	.03	.08
KPI	80	3.81	35.29	13.64	7.66
KPA	80	1	42	16.64	12.75
JADK	80	3	11	6	1.36
PKI	80	.20	.64	.40	.10
JRDK	80	12	87	30	13.77
JAKA	80	2	7	4	1.20
MD	80	72.50	94.59	83.26	5.35
RS	80	-.78	8.31	.26	1.30

B. Uji Hipotesis

Tabel
Hasil Uji *t*
Model Penelitian 1

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	<i>t</i>	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.996	.063		63.531	.000
	KPM	-.088	.068	-.106	-1.283	.204
	KPI	.014	.011	.119	1.245	.217
	KPA	.014	.006	.225	2.163	.034
	JADK	.073	.033	.256	2.182	.032
	PKI	-.030	.026	-.110	-1.141	.257
	JRDK	.039	.016	.245	2.371	.020
	JAKA	.048	.022	.222	2.173	.033

Pengujian Hipotesis Satu

Variabel Kepemilikan Manajerial (KPM) memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,204 > \alpha (0,05)$ dengan nilai koefisien regresi sebesar $-0,088$. Dengan demikian hipotesis satu (H_1) **ditolak**.

Kepemilikan manajerial di perusahaan BUMN masih rendah, sehingga belum tercipta keselarasan kepentingan antara manajemen dengan investor. Hal tersebut diduga belum mampu mendorong pihak manajemen perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi yang memadai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Alvionita dan Tawqa (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* PSAK konvergensi IFRS.

Pengujian Hipotesis Dua

Variabel Kepemilikan Institusional (KPI) memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,217 > \alpha (0,05)$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,014. Dengan demikian hipotesis dua (H_2) **ditolak**.

Kepemilikan institusional di perusahaan BUMN masih rendah sehingga belum mampu meningkatkan pengungkapan wajib yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut diduga bahwa keberadaan pihak institusi belum mampu menekan pihak manajemen untuk melakukan pengungkapan wajib.

Pengujian Hipotesis Tiga

Variabel Kepemilikan Asing (KPA) memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,034 < \alpha (0,05)$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,014. Dengan demikian hipotesis tiga (H_3) **diterima**.

Perusahaan dengan kepemilikan asing cenderung akan memperhatikan jumlah pengungkapan informasi dalam laporan keuangan karena keterbatasan geografis dan bahasa (Serly, 2017). Manurung (2006) menyebutkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing akan cenderung melakukan pengungkapan informasi yang memadai, hal ini dikarenakan investor asing diklaim dapat meningkatkan efisiensi dan *good corporate governance* suatu perusahaan.

Pengujian Hipotesis Empat

Variabel Jumlah Anggota Dewan Komisaris (JADK) memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,032 < \alpha (0,05)$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,073. Dengan demikian hipotesis empat (H_4) **diterima**.

Dengan semakin banyaknya anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka *monitoring* terhadap pihak manajemen akan semakin ketat sehingga akan mereduksi peluang para manajer untuk melakukan tindakan oportunistik pihak manajemen perusahaan yang cenderung mementingkan dirinya sendiri.

Pengujian Hipotesis Lima

Variabel Proporsi Komisaris Independen (KPI) memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,257 > \alpha (0,05)$ dengan nilai koefisien regresi sebesar $-0,030$. Dengan demikian hipotesis lima (H_5) **ditolak**. Keberadaan komisaris independen hanya dianggap sebagai penyeimbang saja dan mereka tidak memiliki kuasa penuh dalam pengambilan keputusan dewan komisaris (Meiflowerina, dkk., 2014). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Gunawan dan Hendrawati (2016).

Pengujian Hipotesis Enam

Variabel Jumlah Rapat Dewan Komisaris (JRDK) memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,020 < \alpha (0,05)$ dengan nilai koefisien regresi sebesar $0,039$. Dengan demikian hipotesis enam (H_6) **diterima**. Intensitas rapat dewan komisaris yang tinggi menunjukkan bahwa kebijakan perusahaan tidak diputuskan sendiri oleh pihak manajemen, melainkan pihak manajemen akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan dewan komisaris sebelum melakukan pengambilan keputusan terkait kebijakan perusahaan. Semakin sering diadakannya rapat, maka dewan komisaris semakin mudah dalam melakukan pengawasan terhadap pihak manajemen apakah mereka telah melakukan pengungkapan informasi yang memadai sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi perusahaan kepada pihak

yang berkepentingan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Suhardjanto (2012).

Pengujian Hipotesis Tujuh

Variabel Jumlah Anggota Komite Audit (JAKA) memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,033 < \alpha (0,05)$ dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,048. Dengan demikian hipotesis tujuh (H_7) **diterima**.

Komite audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan anggotanya untuk melaksanakan fungsinya yaitu memberikan pendapat profesional kepada dewan komisaris dan mengawasi pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit akan *mereview* apakah laporan keuangan yang disajikan perusahaan telah memadai atau tidak, termasuk memastikan apakah pengungkapan informasi telah dilaksanakan sesuai peraturan atau belum. Oleh karena itu, komite audit merupakan bagian penting dalam pelaksanaan *corporate governance*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Gunawan dan Hendrawati (2016).

Tabel
Hasil Uji t
Model Penelitian 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	5.644	2.801		2.015	.047
	MD	-1.259	.635	-.219	-1.984	.051

Pengujian Hipotesis Delapan

Variabel Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* (MD) Konvergensi IFRS memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,051 > \alpha (0,05)$ dengan nilai koefisien regresi sebesar -1.259. Dengan demikian hipotesis delapan (H_8) **ditolak**.

Tidak terdukungnya hipotesis kedelapan diduga karena adanya faktor lain yang mempengaruhi keputusan investasi seorang investor. Beberapa hal yang biasanya dijadikan investor sebagai dasar pengambilan keputusan investasi antara lain : informasi terkait kinerja perusahaan yang tercermin pada laba yang diperoleh perusahaan, besar dividen yang akan diterima serta rencana jangka panjang terkait dengan proyek-proyek yang akan dilaksanakan perusahaan di masa depan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ahmad, dkk. (2017).

V. SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pengujian data dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
3. Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
4. Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
5. Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
6. Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

7. Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.
8. Tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS tidak berpengaruh positif terhadap *return* saham.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa saran untuk perbaikan penelitian kedepannya, saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan proksi mekanisme *corporate governance* pada model penelitian pertama, seperti dualitas peran dewan komisaris atau dualitas peran CEO.
2. *Return* saham dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, oleh karena itu pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variable kontrol, seperti *leverage*, *size* dan *profitabilitas*. Dengan ditambahkan variable kontrol, diharapkan mampu mengendalikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dari faktor lain yang tidak diteliti.
3. Pada penelitian ini, peneliti hanya menganalisis pengungkapan wajib pada laporan laba rugi komprehensif, diharapkan untuk penelitian berikutnya dapat melakukan analisis pengungkapan wajib laporan keuangan secara menyeluruh.
4. Perusahaan BUMN yang digunakan sebagai objek penelitian ini belum mampu memberikan informasi secara luas tentang *mandatory disclosure*, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan objek perusahaan yang berbeda, misalnya perusahaan non-keuangan.

5. Ditambahkan variabel Konvergensi IFRS untuk mengontrol tahapan konvergensi IFRS di Indonesia.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian hanya terbatas pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saja, sehingga belum memberikan informasi secara luas tentang *mandatory disclosure*.
2. Hanya menggunakan tujuh proksi mekanisme *corporate governance*, sedangkan masih terdapat banyak proksi lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Tujuh proksi mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit.
3. Hasil uji F pada model penelitian kedua memiliki nilai signifikan $0,051 > \alpha (0,05)$. Hal tersebut mengindikasikan bahwa model penelitian kedua belum memenuhi asumsi kelayakan model atau *fitness model* pada alpha 0,05 atau 5%.
4. *Return* saham dipengaruhi oleh banyak faktor, namun pada penelitian ini tidak terdapat variabel kontrol sehingga tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS tidak mempengaruhi *return* saham.

DAFTAR PUSTAKA

- Absari, Dyatri Utami Arian, dkk. (2013). Analisis Pengaruh Faktor Fundamental Perusahaan dan Risiko Sistematis terhadap *Return Saham*. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Terapan Vol 3 No.1*.
- Ahmad, Imam Baihaqi, dkk. (2017). Dampak Tingkat Pengungkapan Informasi Perusahaan terhadap Aktivitas Volume Perdagangan dan *Return Saham* (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015).*e-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Vol 6*.
- Alvionita, I., & Taqwa, Salma. (2015). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*. *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang*.
- Budi, Tomas Setya Wahyu & Djazuli, Atim. (2012). Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan Kinerja Keuangan Perusahaan terhadap *Return Saham* Perusahaan di Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2010. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Vol 1 No.2*.
- Fatin, Nurin N. (2017). Pengaruh Struktur *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS pada Laporan Laba Rugi Komprehensif. *Buletin Ekonomi Vol 15 No.1*.
- Fauziah, Isna. (2015). Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Pasca Konvergensi IFRS. *Esensi Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol 5 No.2*.
- Gunawan, Barbara, & Hendrawati, Eka Riana. (2016). Peran Struktur *Corporate Good Governance* dalam Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Periode Setelah Konvergensi IFRS. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol 1 No.1*.
- Hafiz, Rizki M, dkk. (2015). Pengaruh Struktur *Corporate Governance* terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib *Konvergensi IFRS* pada Laporan Laba Rugi Komprehensif (Studi pada Perusahaan Perbankan yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2013). *Simposium Nasional Akuntansi 18, Medan*.
- Hikmah, Noor, dkk. (2011). Faktor – faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV, Aceh*.
- Istiningrum, Andian Ari. (2016). Karakteristik Perusahaan sebagai Anteseden Pengungkapan Wajib Informasi Akuntansi. *Jurnal Economia Vol 12 No.1*.

- Kharis, Abdul & Suhardjanto, Djoko. (2012). *Corporate Governance dan Ketaatan Pengungkapan Wajib pada Badan Usaha Milik Negara. Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol.16 No.1.*
- Kaihatu, Thomas S. (2006). *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol 8 No.1.*
- Linda, Wulan Mey & Kurnia. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Struktur Kepemilikan terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 6 No.12.*
- Marunung, M. (2006). *Investasi Asing, Antara Mitos dan Realita.* Warta Ekonomi. Jakarta.
- Meiflowerina, dkk. (2014). Peran *Corporate Governance* terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *e-Jurnal Universitas Bung Hatta Vol. 4, No. 1.*
- Muntoro, R.K. (2006). Membangun Dewan Komisaris yang Efektif. *Makalah.*
- Naratama, Reza P. & Majidah. (2014). Pengaruh *Environmental Performance* dan *Environmental Disclosure* terhadap *Return Saham.* *EProceedings of Management Telkom University Vol 1 No.3.*
- Nastiti, Anggraini Dwi & Ratmono, Dwi. (2015). Analisis Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap Manajemen Laba dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel *Moderating.* *Diponegoro Journal of Accounting Vol 4 No.3.*
- Nazaruddin, Ietje & Basuki, Agus T. 2017. Analisis Statistik dengan SPSS. Sleman : Denisa Media
- Pitasari, A., & Septiani, A. (2014). *Analisis Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Konvergensi IFRS Pada Laporan Laba Rugi Komprehensif.* (Doctoral Dissertation, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis).
- Prawinandi, W., Suhardjanto, D., & Triatmoko, H. (2012). Peran Struktur *Corporate Governance* Dalam Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS. *Simposium Nasional Akuntansi Xv, Banjarmasin.*
- Rahayuni, Nastiti, dkk. (2018). Mampukah Kinerja Keuangan Memediasi Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan Modal Intelektual?. *Jurnal Kajian Akuntansi Vol 2 No.1.*
- Ramadhani. (2016). Pengaruh Stuktur *Corporate Governance* terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* di Indonesia. *Skripsi.*

- Rustiarini, Ni Wayan. (2011). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol 6 No.1*.
- Sugiyanto, Eviatiwi Kusumaningtyas. (2011). Peningkatan *Return Saham* dan Kinerja Keuangan melalui *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance*. *Jurnal Ilmu Ekonomi ASET Vol 13 No.1*.
- Suhardjanto, Djoko & Miranti, Laras. (2009). *Indonesian Environmental Reporting Index* dan Karakteristik Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Vol 13 No.1*.
- Suhardjanto, Djoko & Yulianingtyas, Rena Rukmita. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Auditing Vol 8 No.1*.
- Sunardi, Harjono. (2010). Pengaruh Penilaian Kinerja dengan ROI dan EVA terhadap *Return Saham* pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Vol.2 No.1: 70-92*.
- Sutiyok, S., & Rahmawati, E. (2016). Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS di Perbankan. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi Vol 15 No.2, 151-162*.
- Utami, Wulan Dwi, dkk. (2012). Investigasi dalam Konvergensi IFRS di Indonesia: Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib dan Kaitannya dengan Mekanisme *Corporate Governance*. *Simposium Nasional Akuntansi 15, Banjarmasin*.
- Vanica, Serly. (2017). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Struktur Kepemilikan terhadap Jumlah Pengungkapan PSAK Berbasis IFRS. *Economac Vol 1 Issue 1*.
- Widjayanti, Septri Ari & Wahidawati. (2015). Pengaruh Struktur Dan Mekanisme *Corporate Governance* pada Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol 4 No.7*.
- Yuliana, Rahmi Dwi. (2016). Pengaruh *IFRS Convergence*, *Corporate Governance*, dan *Ownership Structure* terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*. *Skripsi*